

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SULAWESI UTARA (STUDI PADA KABUPATEN MINAHASA DAN KOTA MANADO)

Jekstar Simatupang¹, Amran T. Naukoko², Wensy Frangky Israel Rompas³

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

E-mail : jekstarsimatupang@gmail.com

ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado berdasarkan indikator ekonomi dan sosial, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan data sekunder time series dari tahun 2010 hingga 2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson dan Theil Index, yang mampu memberikan gambaran kuantitatif tentang tingkat ketimpangan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado cenderung meningkat sejak tahun 2017. Kota Manado mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dengan dominasi sektor jasa dan perdagangan, sementara Kabupaten Minahasa masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Ketimpangan ini diperparah oleh konsentrasi pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan, kurangnya investasi di sektor produktif wilayah rural, serta keterbatasan akses terhadap layanan publik di daerah tertinggal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan di wilayah studi bersifat struktural dan memerlukan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Temuan ini diharapkan menjadi landasan dalam perumusan strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Ketimpangan pembangunan, PDRB per kapita, Indeks Williamson, Theil Index, Sulawesi Utara

ABSTRACT

Regional development inequality is a common phenomenon across various regions in Indonesia, including North Sulawesi Province. This study aims to analyze the level of development inequality between Minahasa Regency and Manado City using economic and social indicators, such as Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita and population. A descriptive quantitative approach was applied, utilizing secondary time-series data from 2010 to 2024 sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS). The analysis methods employed were the Williamson Index and Theil Index, which offer quantitative measures of development disparity. The findings reveal a growing trend of development inequality between Minahasa and Manado, especially since 2017. Manado has experienced more rapid economic growth, driven by the dominance of trade and service sectors, whereas Minahasa remains reliant on agriculture and fisheries. This disparity is exacerbated by concentrated infrastructure development in urban areas, limited investment in rural productive sectors, and restricted access to public services in underdeveloped regions. The study concludes that the inequality observed is structural in nature, requiring more equitable and inclusive development policies. These findings are expected to serve as a foundation for formulating regional development strategies that aim to achieve broader social and economic equity.

Keywords: Development inequality, GRDP per capita, Williamson Index, Theil Index, North Sulawesi

1. PENDAHULUAN

Salah satu provinsi Indonesia yang mengalami ketimpangan dalam pembangunan antarwilayah adalah Sulawesi Utara. Wilayah yang lebih terpencil masih bergantung pada pertanian dan perikanan dengan infrastruktur yang kurang, sementara kota-kota seperti Manado berkembang pesat dengan sektor jasa dan perdagangan yang kuat. Ketidaksamaan ini termasuk berbagai tingkat kemiskinan, perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar kabupaten dan kota, dan perbedaan dalam akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Perbedaan dalam investasi infrastruktur merupakan salah satu penyebab utama disparitas pembangunan. Karena infrastruktur yang tidak merata, beberapa daerah menghadapi tantangan untuk berkembang karena kekurangan jalur transportasi, listrik, dan jaringan komunikasi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang cenderung berpusat pada kota-kota besar juga turut memperparah kesenjangan pembangunan. Wilayah dengan infrastruktur yang lebih baik cenderung menarik investasi dan tenaga kerja, sementara daerah yang tertinggal semakin sulit untuk mengejar

keteringgalan.

Selain faktor infrastruktur dan kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga berperan dalam menciptakan ketimpangan pembangunan. Tingkat pendidikan yang rendah di beberapa daerah menyebabkan rendahnya daya saing tenaga kerja, sehingga penduduk di wilayah tertinggal sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Akibatnya, banyak masyarakat yang melakukan migrasi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan pembangunan yang terus terjadi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi daerah. Salah satunya adalah meningkatnya kesenjangan sosial yang berpotensi memicu konflik sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, wilayah yang tertinggal sering kali mengalami keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan, yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengatasi ketimpangan pembangunan melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan.

Tabel 1. Jumlah Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2024 (Ribuan Jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)	
	Minahasa	Manado
2010	311,31	411,57
2011	315,13	414,78
2012	318,69	417,64
2013	322,28	420,4
2014	325,68	423,26
2015	329,00	425,63
2016	332,19	427,91
2017	335,32	430,13
2018	338,36	431,88
2019	341,18	433,63
2020	347,29	451,92
2021	348,67	453,18
2022	350,32	454,61
2023	351,92	458,58
2024	353,54	460,43

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara Tahun 202

Tabel ini menyajikan data jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa dan Kota Manado dari tahun 2010 hingga 2024. Data ini bertujuan untuk memperlihatkan perkembangan jumlah penduduk di kedua wilayah sebagai salah satu indikator sosial yang mencerminkan dinamika pembangunan. Kabupaten Minahasa, yang umumnya didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan, menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang berbeda dibandingkan Kota Manado yang merupakan pusat perdagangan dan jasa di Sulawesi Utara. Kota Manado, dengan tingkat urbanisasi dan migrasi masuk yang lebih tinggi, cenderung mengalami peningkatan jumlah penduduk yang lebih cepat dibandingkan Kabupaten Minahasa. Perbandingan ini penting untuk menganalisis kontribusi pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan pembangunan antar kedua wilayah tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang sangat penting untuk menilai kinerja perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi, terutama untuk menganalisis hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah. (Umiyati,2014). Karena pertumbuhan merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi regional dan memiliki konsekuensi kebijakan yang signifikan, analisis ekonomi regional memerlukan teori pertumbuhan ekonomi regional. (Umiyati,2014). Pertambahan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut, atau nilai tambah secara keseluruhan, disebut pertumbuhan ekonomi wilayah. Perhitungan pendapatan daerah awalnya dibuat menggunakan harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertumbuhan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya harus dinyatakan dengan nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

(Umiyati, 2014).

Perekonomian suatu negara menghadapi masalah pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan ekonomi diukur sebagai prestasi dari perkembangan kegiatan ekonomi yang menghasilkan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat serta peningkatan kemakmuran masyarakat. Pembentukan atau pengumpulan modal merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi. Baik modal materil maupun modal manusia termasuk dalam pembentukan modal. Ada yang berpendapat bahwa hanya modal materil yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Dengan pembentukan modal diharapkan tujuan utama pembangunan akan dicapai. (Adin et.,al, 2022).

Serangkaian kebijakan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat adalah penyebab pertumbuhan ekonomi yang cepat. Oleh karena itu, hal yang penting untuk dilakukan dan diperhatikan adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pembangunan. Untuk mencapai konvergensi, kebijakan ini harus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. (Didia.,2016). Fokus pembangunan lokal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah indikator keberhasilan negara, jadi pemerintah selalu menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam perencanaan dan tujuan pembangunan. (Didia, 2016).

Pembangunan ekonomi lokal adalah proses di mana pemerintah dan masyarakat lokal bekerja sama dengan perusahaan swasta dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Yulyanti & Jami, 2021). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi sebuah daerah adalah pertumbuhan ekonomi, suatu proses peningkatan kapasitas produktif perekonomian secara keseluruhan yang terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu yang menghasilkan peningkatan tingkat pendapatan yang semakin lama semakin besar. (Mashud et al., 2018). Pertumbuhan dan pemerataan adalah dua sisi strategi pembangunan yang sering mengabaikan satu sama lain. Ini berarti bahwa

pemerataan cenderung diabaikan ketika pembangunan berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Mekanisme tetesan kebawah (trickle down effect) akan membantu pemerintah mencapai tujuan mereka untuk membuat kebijakan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesetaraan hasil pembangunan.. (Berlianantiya, 2017).

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan di dalam suatu wilayah, tetapi dampak yang ditimbulkannya sering kali bervariasi tergantung pada konteks spesifik dan tingkat perkembangan yang dicapai oleh setiap daerah. Misalnya, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, sering kali terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor-sektor dengan produktivitas rendah ke sektor-sektor yang lebih produktif, yang biasanya dapat meningkatkan ketidakmerataan pendapatan. (Barros & Teixeira, 2021) Selain itu, berbagai faktor lain juga mempengaruhi bagaimana pertumbuhan ekonomi berdampak pada distribusi pendapatan. Kondisi pasar tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta struktur industri di suatu wilayah dapat memainkan peranan yang sangat signifikan. (Barros & Teixeira, 2021)

2.2 Ketimpangan Pembangunan Antar wilayah

Pengukuran ketimpangan pembangunan umumnya melibatkan analisis terhadap tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dalam wilayah tertentu, yang kemudian dibandingkan satu sama lain. Koefisien Gini, distribusi pendapatan, dan rasio pendapatan antara kelompok masyarakat yang berbeda adalah beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan ini. Jurnal ini menyoroti bahwa ketimpangan regional dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel, termasuk kondisi ekonomi, struktur industri, kualitas pasar tenaga kerja, kebijakan fiskal, serta investasi dalam pendidikan dan teknologi. (Barros & Teixeira, 2021).

Ada tiga faktor yang menyebabkan ketimpangan: alami, sosial, dan kebijakan. Faktor alami termasuk kondisi sumber daya alam, jarak pelabuhan dengan pusat aktivitas ekonomi, lokasi geografis, dan wilayah potensial. Faktor sosial budaya termasuk nilai tradisi, mobilitas ekonomi, inovasi, dan wirausaha. Faktor terakhir, faktor kebijakan, adalah berbagai kebijakan yang mendukung ketimpangan secara langsung atau tidak langsung. Tidak semua orang di Indonesia dapat menikmati proses pembangunan karena kebijakan pemerintah saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. (Pratiwi, 2021).

Douglas C. North menciptakan ketimpangan antar wilayah ketika dia menganalisis Teori

Pertumbuhan Neo Klasik. Teori ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat diprediksi, dan hipotesa ini kemudian dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik. Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan dalam jumlah uang yang diterima oleh sebagian besar masyarakat, yang menyebabkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antara golongan yang berbeda dalam masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah, sering terjadi ketidaksesuaian antar daerah. (Sondakh et al., 2023).

Ketimpangan pembangunan yang diakibatkan oleh perbedaan potensi dan pertumbuhan ekonomi setiap daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk masing-masing daerah. Oleh sebab itu, untuk melakukan pembangunan yang terarah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan suatu kebijakan dalam proses pertumbuhan ekonomi daerah. Karena tingginya jumlah penduduk di suatu daerah akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dapat dilihat dari segi jumlah penduduknya. (Andriyani & Rizkia, 2022) Karena perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan, ada perbedaan dalam pembangunan antara daerah dan pusat. (Zulham et al., 2019).

Ekonomi di banyak daerah mengalami ketimpangan atau disparitas karena sumber daya alam dan demografi yang berbeda. Dengan perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk mendorong proses pembangunan juga berbeda. (Sondakh et al., 2023).

Ketimpangan pembangunan paling sering terjadi pada bagian pendapatan dan spasial. Sebaliknya, metode pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah semakin meningkat. Karena kemungkinan konflik antar daerah atau wilayah meningkat, daerah-daerah yang sebelumnya tidak terpengaruh oleh pembangunan mulai menuntut hak-hak mereka sendiri. Selain itu, interaksi yang saling melemah muncul. Sumber daya alam yang berbeda dan kondisi demografis yang berbeda di masing-masing wilayah menyebabkan sebagian besar ketidaksamaan. (Maramis et al., 2021).

Solusi untuk mengatasi ketimpangan wilayah adalah pemerataan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dan baik, kesejahteraan masyarakat akan ditingkatkan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan informasi. (Iqbal et al., 2019). Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah keadaan di mana pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah berbeda, yang pada gilirannya menyebabkan perbedaan tingkat pendapatan per kapita di antara wilayah tersebut. (Pujiati & Wahyuntari, 2016). Ini menyebabkan ketidakmerataan perekonomian di suatu wilayah, atau perbedaan kemajuan antar wilayah, yang berarti bahwa kemampuan untuk bertumbuh tidak sama dengan kesenjangan. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan berupa pendapat dan studi empiris yang menganggap pertumbuhan dan pemerataan sebagai dikotomis. (Pangemanan et al., 2020).

2.3 Penelitian terdahulu

Anjani Anwar, A., F. Rorong, I. P., & Tolosang, K. D. (2023) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2012–2021, di mana nilai indeks mencapai 0,50. Nilai tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang cukup tinggi. Temuan ini sangat relevan dengan penelitian ini karena memperkuat adanya kesenjangan pembangunan yang serius antara daerah di Sulawesi Utara, termasuk Minahasa dan Manado.

Raven Derek, R., Esry Laoh, O., & Jocom, S. (2019) dengan penelitiannya yang berjudul *Analyze The Level Of Regional Inequality In Nort Sulawesi Province*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ketimpangan wilayah berdasarkan pertumbuhan penduduk di Sulawesi Utara. Dengan menganalisis data pertumbuhan penduduk antarwilayah, penelitian ini menemukan bahwa terdapat variasi laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan antarwilayah, di mana Kotamobagu memiliki pertumbuhan tertinggi sementara Kepulauan Sangihe terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi penduduk yang tidak merata turut berkontribusi pada ketimpangan pembangunan, yang menjadi salah satu dimensi penting dalam skripsi ini.

Widjaja, I., Deddy T. Tikson, & Rahmadanih. (2022) dengan penelitiannya yang berjudul

Association Of Development Disparity, Economic Growth On Poverty In South Sulawesi Province. Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara ketimpangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana ketiga variabel tersebut saling memengaruhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah hubungan antara ketimpangan dan kemiskinan berbeda-beda tergantung wilayah yang diteliti. Relevansi dari penelitian ini adalah bahwa konteks wilayah bisa memberikan pengaruh besar terhadap dinamika ketimpangan, sehingga studi yang lebih spesifik (seperti antara Minahasa dan Manado) menjadi penting.

Lapian, A. Lutherani. Ch. P., Walewangko, E. N., & Yapanto, L. M. (2023) dengan penelitiannya yang berjudul *The Effect Of Population, Human Development Indeks, And Gross Regional Domestic Product On Poor Population*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya peningkatan PDRB cenderung menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian ini penting sebagai pendukung asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi (diukur melalui PDRB) bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial.

Yusniar, R. (2019) dengan penelitiannya yang berjudul *Factors Analysis On Affecting Regional Inequality In South Sulawesi Province, 2010-2016*. Penelitian ini menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah peningkatan kualitas hidup berdampak terhadap pemerataan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Temuan ini membuka kemungkinan bahwa indikator sosial seperti IPM belum tentu secara langsung berkontribusi pada pemerataan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder yang bersifat time series, yaitu data yang dikumpulkan secara berkala selama periode waktu tertentu, yakni dari tahun 2010 hingga 2024. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber resmi dan kredibel, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara, serta publikasi lembaga pemerintah lainnya yang relevan. Sumber data ini dianggap valid karena disusun menggunakan metode statistik yang terstandarisasi secara nasional.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data sekunder yang dikumpulkan, diproses, dan dipublikasikan oleh lembaga resmi digunakan dalam penelitian ini. Sumber utama data dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara, yang menyediakan data terkait indikator ekonomi dan sosial wilayah studi, yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Manado. Data sekunder dipilih karena mereka objektif dan terstandarisasi, dan dapat digunakan untuk analisis kuantitatif dan deskriptif tingkat ketimpangan pembangunan.

3.3 Metode Analisis

Untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, digunakan dua metode utama, yaitu Indeks Williamson dan Theil Index. Kedua metode ini telah banyak digunakan dalam studi-studi terdahulu yang berfokus pada ketimpangan pembangunan, dan dinilai mampu memberikan indikator yang valid dan reliabel terhadap tingkat disparitas pembangunan antarwilayah.

3.3.1 Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah dengan memperhatikan variasi PDRB per kapita serta proporsi jumlah penduduk di tiap wilayah. Nilai indeks ini diperoleh dari rumus yang membandingkan distribusi PDRB per kapita suatu daerah terhadap rata-rata PDRB wilayah yang dianalisis secara keseluruhan. Rumus Indeks Williamson secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut:

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}{y}} \quad 0 < V_w < 1$$

Keterangan:

IW = Indeks Williamson

y_i = PDRB perkapita (dalam penelitian ini PDRB Per Kapita Kabupaten)

y = PDRB perkapita (Provinsi)

f_i = Jumlah Penduduk (dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Kabupaten)

n = Jumlah Penduduk (Provinsi)

Penafsiran:

Bila nilai V_w (Indeks Williamson) mendekati 0 menunjukkan ketimpangan rendah atau pembangunan yang relatif merata. Bila nilai V_w (Indeks Wiliamson) mendekati 1(satu) menandakan ketimpangan tinggi. Secara umum, jika nilai indeks berada di atas 0,5, maka ketimpangan dianggap tinggi, sedangkan jika berada di bawah 0,3, maka dianggap rendah. Penggunaan Indeks Williamson dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan pembangunan antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado selama periode 2010– 2024.

3.3.2 Theil Indeks

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan Theil Index yang berasal dari konsep entropi informasi dalam teori ekonomi. Indeks ini mampu mengukur ketimpangan ekonomi baik antarwilayah (between group) maupun dalam wilayah (within group), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang distribusi ketimpangan pembangunan. Sedangkan data yang diperlukan untuk mengukur indeks ini adalah sama dengan yang diperlukan untuk menghitung Wiliamson Indeks yaitu PDRB Perkapita untuk setiap wilayah dan jumlah penduduk. Demikian pula halnya dengan penafsirannya yang juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. Berikut formulasi Theil Indeks (Td) dinyatakan sebagai berikut:

$$Td = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \{y_{ij}/Y\} \log[\{y_{ij}/Y\}/\{n_{ij}/N\}]$$

Keterangan:

y_{ij} = PDRB perkapita kabupaten i di provinsi j

Y = Jumlah PDRB perkapita seluruh provinsi j

n = Jumlah penduduk kabupaten i di provinsi j

N = Jumlah penduduk seluruh kabupaten

Penafsiran:

Bila nilai Theil Indeks (Td) mendekati 0 menunjukkan pembangunan yang merata, sedangkan nilai angka mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin besar. Theil Index juga memungkinkan dekomposisi, yaitu untuk mengetahui kontribusi masing-masing wilayah terhadap ketimpangan total, sehingga dapat diidentifikasi daerah mana yang menjadi sumber utama ketimpangan.

Penggunaan Theil Index dalam penelitian ini mendukung hasil dari Indeks Williamson, serta memberikan informasi tambahan tentang karakteristik dan struktur ketimpangan antar dan dalam wilayah yang diteliti.

4.1 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Hasil

4.1.1.1 Analisis Ketimpangan dengan Indeks Williamson

Indeks Williamson mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah dengan mempertimbangkan besaran PDRB per kapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Nilai indeks yang mendekati 0 menunjukkan ketimpangan rendah, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan tinggi.

**Tabel 2. Analisis Ketimpangan dengan Indeks Williamson
Kabupaten Minahasa (2010–2024)**

Tahun	Indeks Williamson Minahasa
2010	0.11920
2011	0.11347
2012	0.11371
2013	0.12336
2014	0.10359
2015	0.08051
2016	0.03555
2017	0.00293
2018	0.06049
2019	0.11573
2020	0.16532
2021	0.17610
2022	0.17191
2023	0.17619
2024	0.17847

Sumber: Hasil Data Diolah, 2025

Tabel ini menggambarkan besarnya ketimpangan pembangunan ekonomi yang dikontribusikan oleh Kabupaten Minahasa terhadap total Indeks Williamso gabungan. Nilai ketimpangan Minahasa mengalami fluktuasi, dengan titik terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 0.00293 dan nilai tertinggi mencapai 0.17847 pada tahun 2024. Peningkatan kontribusi Minahasa dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan ketimpangan relatif yang meningkat karena pertumbuhan ekonominya tidak mampu mengejar laju pertumbuhan Kota Manado.

Tabel 3. Analisis Ketimpangan dengan Indeks Williamson Kota Manado (2010–2024)

Tahun	Indeks Williamson Manado
2010	0.15880
2011	0.15153
2012	0.15229
2013	0.16564
2014	0.13941
2015	0.10849
2016	0.04845
2017	0.00407
2018	0.08451
2019	0.16227
2020	0.23068
2021	0.24690
2022	0.24309
2023	0.24881
2024	0.25853

Sumber: Hasil Data Diolah, 2025

Tabel ini menunjukkan kontribusi Kabupaten Minahasa terhadap total ketimpangan PDRB per kapita antara Minahasa dan Manado selama periode 2010 hingga 2024 berdasarkan pendekatan Theil Index. Nilai kontribusi Minahasa secara konsisten lebih rendah dibandingkan dengan Kota Manado, mencerminkan bahwa posisi PDRB per kapita di Minahasa masih berada di bawah rata-rata gabungan kedua wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Minahasa tumbuh dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan Manado, sehingga dalam perhitungan Theil Index, nilai kontribusinya cenderung menarik ketimpangan ke arah negatif, yang berarti wilayah ini menjadi faktor penyeimbang dalam

ketimpangan regional.

Meskipun kontribusinya relatif kecil, perubahan nilainya dari tahun ke tahun tetap penting untuk diperhatikan karena menunjukkan dinamika hubungan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Sulawesi Utara. Pada awal periode pengamatan, nilai kontribusi Minahasa masih sangat rendah, menggambarkan kesenjangan yang cukup besar antara aktivitas ekonomi di wilayah Minahasa yang lebih didominasi oleh sektor pertanian dan wilayah Manado yang menjadi pusat perdagangan dan jasa. Namun, seiring waktu, nilai kontribusi Minahasa menunjukkan fluktuasi yang mengindikasikan adanya upaya perbaikan dan peningkatan produktivitas ekonomi di daerah tersebut, meskipun belum cukup untuk menandingi laju pertumbuhan di Manado.

Nilai kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2024, yaitu sebesar 0.00153, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa memberikan sumbangan sebesar itu terhadap total ketimpangan pada tahun tersebut. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa meskipun Minahasa masih berada di bawah rata-rata PDRB gabungan, pertumbuhan ekonominya mulai memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap ketimpangan regional. Kondisi ini dapat disebabkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi di beberapa sektor seperti pertanian modern, pariwisata pedesaan, serta peningkatan infrastruktur antarwilayah yang mulai membuka akses pasar dan investasi baru di wilayah Minahasa. Dengan demikian, perubahan kontribusi ini tidak hanya merefleksikan kesenjangan yang masih ada, tetapi juga menggambarkan proses penyesuaian ekonomi antarwilayah yang terus berlangsung seiring dengan pembangunan yang semakin meluas di kawasan Sulawesi Utara.

**Tabel 4. Analisis Ketimpangan dengan Indeks Williamson
Kabupaten Minahasa dan Kota Manado (2010–2024)**

Tahun	Indeks Williamson
2010	0.278
2011	0.265
2012	0.266
2013	0.289
2014	0.243
2015	0.189
2016	0.084
2017	0.007
2018	0.145
2019	0.278
2020	0.396
2021	0.423
2022	0.415
2023	0.425
2024	0.437

Sumber: Hasil Data Diolah, 2025

Menyajikan nilai Indeks Williamson yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado. Nilai indeks ini mempertimbangkan jumlah penduduk dan PDRB per kapita setiap wilayah, dengan hasil berupa angka antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 0 berarti semakin merata, dan semakin mendekati 1 berarti semakin timpang. Berdasarkan tabel, nilai indeks mengalami fluktuasi. Pada 2010, nilai indeks sebesar 0,278, menunjukkan ketimpangan pada tingkat sedang. Indeks sempat turun drastis hingga 0,007 pada 2017, yang menunjukkan pemerataan cukup baik pada tahun tersebut. Namun, mulai 2018 terjadi peningkatan kembali dan mencapai 0,437 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kecenderungan peningkatan ketimpangan antarwilayah seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih terkonsentrasi di Kota Manado.

4.1.1.2 Analisis Ketimpangan dengan Theil Indeks

**Tabel 5. Analisis Ketimpangan Dengan Theil Index
Kabupaten Minahasa (2010–2024)**

Tahun	Theil Index Minahasa
2010	0.00100
2011	0.00096
2012	0.00094
2013	0.00102
2014	0.00089
2015	0.00064
2016	0.00029
2017	0.00003
2018	0.00051
2019	0.00097
2020	0.00142
2021	0.00151
2022	0.00148
2023	0.00151
2024	0.00153

Sumber: Hasil Data Diolah, 2025

Tabel ini menunjukkan kontribusi Kabupaten Minahasa terhadap total ketimpangan PDRB per kapita antara Minahasa dan Manado dari tahun 2010 hingga 2024 berdasarkan pendekatan Theil Index. Nilai kontribusi Minahasa cenderung lebih rendah dibandingkan Manado, mencerminkan bahwa posisi PDRB per kapita Minahasa berada di bawah rata-rata gabungan, sehingga menarik nilai ketimpangan ke arah negatif (dalam penghitungan aslinya). Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 0.00153, menunjukkan bahwa Minahasa berkontribusi sebesar itu terhadap total ketimpangan tahun tersebut.

**Tabel 6. Analisis Ketimpangan dengan Theil Index
Kota Manado tahun 2010-2024**

Tahun	Theil Index Manado
2010	0.00134
2011	0.00128
2012	0.00127
2013	0.00136
2014	0.00119
2015	0.00094
2016	0.00042
2017	0.00003
2018	0.00072
2019	0.00139
2020	0.00204
2021	0.00215
2022	0.00210
2023	0.00215
2024	0.00226

Sumber: Hasil Data Diolah, 2025

Tabel ini menunjukkan kontribusi Kota Manado terhadap total ketimpangan PDRB per kapita antara kedua wilayah berdasarkan Theil Index. Nilai kontribusi Manado secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa karena PDRB per kapitanya berada di atas rata-rata gabungan kedua wilayah tersebut, sehingga mendorong ketimpangan ke arah positif. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Manado berlangsung jauh lebih pesat dibandingkan daerah sekitarnya,

sejalan dengan perannya sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan jasa di Provinsi Sulawesi Utara.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, urbanisasi, serta konsentrasi sektor-sektor produktif seperti perdagangan, perbankan, jasa keuangan, transportasi, dan pariwisata di wilayah perkotaan, kontribusi Manado terhadap ketimpangan regional juga semakin besar. Peningkatan investasi swasta, pembangunan infrastruktur perkotaan, dan pertumbuhan kelas menengah di Kota Manado turut mempercepat akumulasi pendapatan di wilayah ini, sementara daerah di sekitarnya belum berkembang dengan kecepatan yang sama. Akibatnya, kesenjangan ekonomi antarwilayah menjadi semakin nyata, baik dalam hal produktivitas tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja, maupun kualitas fasilitas publik.

Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kontribusi hingga mencapai 0.00226 pada tahun 2024, yang menandakan bahwa Kota Manado semakin mendominasi perekonomian regional. Kenaikan tersebut bukan hanya mencerminkan kemajuan ekonomi kota, tetapi juga mengindikasikan adanya ketimpangan struktural yang semakin melebar antara kawasan perkotaan yang maju dan daerah penyangga yang masih tertinggal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hasil pembangunan belum

sepenuhnya inklusif, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di pusat kota belum secara optimal tersebar ke wilayah perdesaan di sekitarnya. Dengan kata lain, meskipun Kota Manado menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, pola pertumbuhan yang terpusat ini justru memperbesar disparitas ekonomi antarwilayah. Ketimpangan tersebut dapat berdampak pada beragam aspek sosial-ekonomi, seperti meningkatnya migrasi ke kota, perubahan struktur ketenagakerjaan, hingga munculnya ketergantungan ekonomi daerah sekitar terhadap pusat kota. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi Kota Manado terhadap ketimpangan tidak hanya menjadi indikator kemajuan ekonomi perkotaan, tetapi juga menjadi peringatan penting bagi pembuat kebijakan agar pertumbuhan ekonomi di masa depan dapat diarahkan menuju pemerataan dan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

Tabel 7. Analisis Ketimpangan dengan Theil Index Kabupaten Minahasa dan Kota Manado (2010–2024)

Tahun	Theil Index
2010	0.00234
2011	0.00224
2012	0.00221
2013	0.00238
2014	0.00208
2015	0.00158
2016	0.00071
2017	0.00006
2018	0.00123
2019	0.00236
2020	0.00346
2021	0.00366
2022	0.00358
2023	0.00366
2024	0.00379

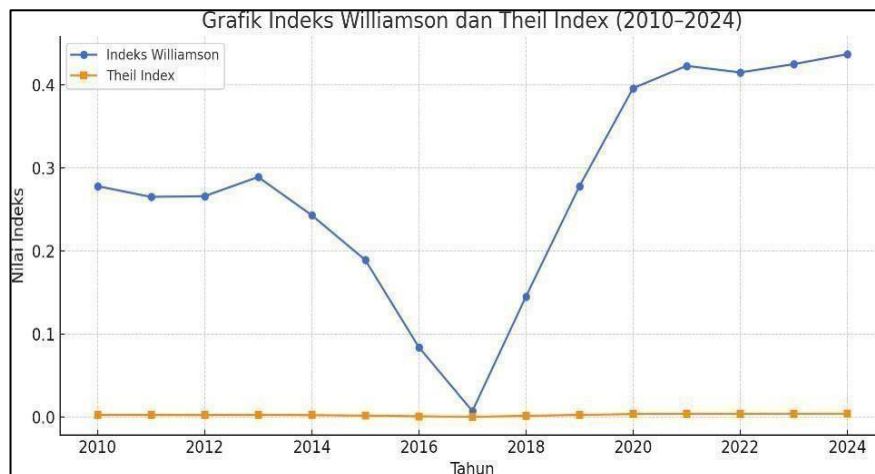
Sumber: Hasil Data Diolah, 2025

Tabel ini menunjukkan nilai Theil Index, yang merupakan ukuran entropi atau ketidakteraturan distribusi pendapatan antarwilayah. Indeks ini digunakan untuk menggambarkan seberapa besar ketimpangan yang terjadi di antara wilayah-wilayah dalam suatu perekonomian. Meskipun nilai Theil Index relatif kecil karena sifat dasarnya yang sensitif terhadap variasi antarwilayah, perubahan tren kenaikan atau penurunannya tetap memberikan informasi penting mengenai dinamika ketimpangan ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2010, nilai Theil Index tercatat sebesar 0,00234, menunjukkan adanya ketimpangan yang masih tergolong rendah. Namun, pada periode berikutnya, nilai indeks menurun secara konsisten hingga mencapai titik terendah 0,00006 pada tahun 2017, yang menandakan terjadinya perbaikan

distribusi pendapatan antarwilayah serta semakin meratanya pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado pada masa tersebut. Meskipun demikian, setelah tahun 2017, tren penurunan tersebut tidak berlanjut. Nilai indeks mulai meningkat secara bertahap dan mencapai 0,00379 pada tahun 2024, mencerminkan munculnya kembali ketimpangan antarwilayah. Kenaikan ini menunjukkan bahwa, meskipun perbedaan pendapatan antarwilayah belum mencapai tingkat yang ekstrem dalam nilai absolut, ketimpangan tersebut tumbuh secara perlahan namun konsisten. Fenomena ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah penelitian berlangsung secara tidak merata, di mana Kota Manado mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa. Faktor-faktor seperti konsentrasi kegiatan ekonomi di pusat kota, perbedaan infrastruktur, peluang investasi, serta tingkat produktivitas tenaga kerja dapat menjadi pendorong utama ketimpangan tersebut. Dengan demikian, hasil pengukuran Theil Index ini memberikan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, khususnya antara Kota Manado dan Kabupaten Minahasa, masih menghadapi tantangan dalam mencapai pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

4.1.1.3 Visualisasi Ketimpangan Pembangunan

Gambar 1. Tren Indeks Williamson dan Theil Index Kabupaten Minahasa dan Kota Manado Tahun 2010–2024 (dalam angka desimal)



Sumber : Hasil Olahan Data

Tampak bahwa kedua indeks menunjukkan pola yang mirip, dengan penurunan ketimpangan pada tahun 2016–2017, lalu kembali meningkat hingga 2024. Hal ini mencerminkan adanya distribusi pembangunan yang masih belum merata. Pola ini menjadi bukti kuantitatif bahwa pembangunan wilayah masih bersifat terpusat dan belum menyentuh daerah secara merata.

4.2 Pembahasan

1. Perbedaan ketimpangan yang terukur dari Indeks Williamson dan Theil Index mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado, masih belum merata.
2. Nilai Indeks Williamson yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah semakin nyata, dengan Kota Manado menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama. Hal ini juga diperkuat oleh tren Theil Index yang menunjukkan ketimpangan struktural berbasis distribusi PDRB dan penduduk.

Faktor-faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ini antara lain:

1. Ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur: Pembangunan jalan, jaringan transportasi, fasilitas pendidikan, dan layanan publik lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Manado. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses ekonomi di daerah-daerah seperti Minahasa, yang menyebabkan rendahnya produktivitas sektor lokal.
2. Konsentrasi kegiatan ekonomi dan perdagangan: Kota Manado memiliki peran dominan sebagai pusat bisnis, jasa keuangan, pariwisata, dan administrasi pemerintahan. Hal ini menarik lebih banyak

investasi dan tenaga kerja ke kota, sehingga memperbesar disparitas terhadap daerah di sekitarnya yang lebih berbasis sektor primer.

3. Kurangnya investasi sektor produktif di Minahasa: Daerah seperti Minahasa belum mendapatkan aliran modal yang optimal untuk mengembangkan sektor agrikultur, perikanan, dan industri pengolahan. Selain itu, keterbatasan teknologi dan akses pasar turut memperlambat perkembangan ekonomi lokal.
4. Oleh karena itu, strategi pembangunan daerah harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pembangunan infrastruktur di daerah rural, serta memberikan insentif bagi sektor-sektor unggulan lokal seperti agrowisata, pertanian modern, dan industri rumah tangga. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM, pendampingan UMKM, dan distribusi anggaran pembangunan yang lebih adil akan menjadi langkah penting dalam menekan ketimpangan secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

1. Berdasarkan kajian teori, data sekunder, dan hasil analisis awal dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi ketimpangan pembangunan antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2010–2024. Kota Manado, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa dan perdagangan, menunjukkan tingkat PDRB per kapita yang konsisten lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Minahasa yang cenderung bergantung pada sektor primer. Hal ini mengindikasikan konsentrasi pembangunan yang berpusat di wilayah perkotaan, yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan masyarakat antarwilayah.
2. Pengukuran menggunakan Indeks Williamson dan Theil Index menunjukkan adanya tren peningkatan ketimpangan selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah tahun 2017.
3. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan dalam hal infrastruktur, akses layanan publik, dan distribusi investasi. Faktor-faktor penyebab ketimpangan yang teridentifikasi meliputi konsentrasi pembangunan di perkotaan, kurangnya investasi pada sektor produktif di wilayah rural, serta lemahnya konektivitas antarwilayah. Oleh karena itu, kesenjangan ini perlu dicermati lebih lanjut dalam penelitian skripsi mendatang untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Adin, M., Daud, H., & Said, M. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayahkecamatan Di Kota Ternate. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 1–23.
- Andriyani, D., & Rizkia, C. T. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten-Kabupaten Wilayah Timur Provinsi Aceh. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 1(2), 38–48.
- Anjani Anwar, A., F. Rorong, I. P., & Tolosang, K. D. (2023). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 85–96.
- Barros, D., & Teixeira, A. A. C. (2021). Unlocking The Black Box: A Comprehensive Meta- Analysis Of The Main Determinants Of Within- Region Income Inequality. *Review Of Regional Research*, 41(1), 55–93. <https://doi.org/10.1007/S10037-020-00149-0>
- Berlianantiya, M. (2017). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kebijakan Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur. 5(2), 163–171.
- Didia, K. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Kawasan Kedungsepur. *Economics Deveopment Anaysis Journal*, 5(1), 101–108. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>

- Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Provinsi Aceh. *Tataloka*, 21(1), 75. <https://doi.org/10.14710/Tataloka.21.1.75-84>
- Lapian, A. Lutherani. Ch. P., Walewangko, E. N., & Yapanto, L. M. (2023). The Effect Of Population, Human Development Index, And Gross Regional Domestic Product On Poor Population. *International Journal Of Professional Business Review*, 8(5), E02221. <https://doi.org/10.26668/Businessreview/2023.V8i5.2221>
- Maramis, M. Th. B., Intan Hadju, I., & Masinambow, V. A. J. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 1, 110–120.
- Mashud, A., Benu, N. M., & Sondakh, M. L. (2018). Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Di Provinsi Maluku Utara. *Agri-Sosioekonomi Unsrat*, 14(1), 117–124.
- Pangemanan, J., Naibaho, G. O., & Mandei, J. R. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Terakreditasi Jurnal Nasional Sinta*, 5(3), 369–378.
- Pratiwi, M. C. Y. (2021). Analisis Ketimpangan Antarwilayah Dan Pergeseran Struktur Ekonomi Di Kalimantan. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(1), 131–154. <https://doi.org/10.24258/Jba.V17i1.779>
- Pujiati, A., & Wahyuntari, L. I. (2016). Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 5(3), 296–305. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/Edaj>
- Raven Derek, R., Esry Laoh, O., & Jocom, S. (2019). Analyze The Level Of Regional Inequality In North Sulawesi Province. *Agrirud*, 1(2), 254–264.
- Sondakh, C. A., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2023). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Empat Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(4), 1–12.
- Umiyati, E. (2014). Analisa Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(7), 42–50.
- Widjaja, I., Deddy T. Tikson, & Rahmadanih. (2022). Association Of Development Disparity, Economic Growth On Poverty In South Sulawesi Province. *The Journal Of Indonesia Sustainable Development Planning*, 3(3), 246–255. <https://doi.org/10.46456/Jisdep.V3i3.213>
- Yulyanti, S., & Jami, P. (2021). Analisis Disparitas Pembangunan Di Provinsi Riau. Analisis Disparitas Pembangunan, 32(2), 108–115. <https://journal.uir.ac.id/index.php/Kiat>
- Yusniar, R. (2019). Factors Analysis On Affecting Regional Inequality In South Sulawesi Province, 2010-2016. *East African Scholars Journal Of Economics, Business And Management*, 2(11), 641–645.
- Zulham, T., Reza, M. R., & Jamal, Abd. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Dan Distribusi Pendapatan Wilayah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 6(1), 17–32